

## PEMROV JATENG SALURKAN BLT UNTUK 81.185 BURUH ROKOK DI KABUPATEN KUDUS



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/12/12/blt-buruh-rokok.jpg.webp>

### Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk 81.185 pekerja rokok sebanyak 38.221 penerima di antaranya merupakan pekerja rokok di Kabupaten Kudus.

"Penyaluran BLT hari ini (12/12) merupakan tambahan pada anggaran perubahan tahun 2023 yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Jateng Kepala Dinas Sosial Provinsi Jateng Imam Maskur ditemui usai peresmian penyaluran BLT tahap III di brak atau gudang produksi rokok PT Djarum di Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Selasa.

Besarnya BLT yang diberikan kepada 81.185 pekerja di sektor rokok itu, kata dia, sebesar Rp300 ribu untuk masing-masing pekerja.

Penerima BLT tahap III tersebut, kata dia, sarannya untuk 78.000 orang, namun ada penambahan 3.185 orang sebagai optimalisasi BLT gagal salur pada periode Maret-Juni 2023, karena ada yang meninggal dunia, pindah alamat, menolak menerima karena merasa mampu, dan sudah dapat bantuan lain terutama BLT dana desa. Sehingga total penerima 81.185 orang, sedangkan 38.221 penerima di antaranya merupakan warga Kudus.

Penyaluran BLT tersebut, kata dia, menggandeng PT Pos dengan penyaluran di titik komunitas, seperti di sekitar pabrik rokok, balai desa atau hantaran ke alamat masing-masing dengan biaya jasa transportasi Rp14.000.

Ia mengingatkan program BLT ini juga dalam rangka meningkatkan motivasi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok untuk tetap beraktivitas pada bidang pertembakauan.

"Mudah-mudahan bisa meringankan beban hidup para penerima, serta dapat menjadi modal untuk terus maju, berkarya, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ingat jangan digunakan untuk membiaya perawatan wajah, melainkan untuk membeli bahan pokok untuk kebutuhan hidup sehari-hari," ujarnya.

Penjabat Bupati Kudus Bergas Caturisasi Penanggungungan menganggap BLT untuk buruh rokok ini juga bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kudus. Bahkan, dari total penerima BLT dari Provinsi Jateng terbanyak dari warga Kudus.

"Tahun depan masih ada alokasi BLT untuk buruh rokok. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan disebutkan 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan 30 persen di antaranya diberikan dalam bentuk BLT," ujarnya.

Anik Susanti, salah satu pekerja rokok mengakui dana BLT yang diterima memang digunakan untuk membeli beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

"Saya sangat berterima kasih mendapatkan tambahan setelah sebelumnya mendapatkan empat kali menerima BLT yang saya terima mulai bulan Maret-Juni 2023, kini ada tambahan satu kali," ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/517803/pemprov-jateng-salurkan-blt-untuk-81185-buruh-rokok-di-kabupaten-kudus>, “Pemprov Jateng Salurkan BLT Untuk 81.185 Buruh Rokok di Kabupaten Kudus”, tanggal 12 Desember 2023.
2. <https://www.wartabanyumas.com/pemprov-jateng-salurkan-blt-untuk-81185-buruh-rokok-di-kabupaten-kudus>, “Pemprov Jateng Salurkan BLT untuk 81.185 Buruh Rokok di Kabupaten Kudus”, tanggal 13 Desember 2023.

#### **Catatan:**

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana

yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.<sup>1</sup>

- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.<sup>2</sup>
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup>
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 55
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
    - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
  2. Pasal 56
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
    - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
    - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

---

<sup>1</sup> “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.<sup>4</sup> Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Lampiran